

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PT X)

Oleh: Bill Gates Mandheza Windson*

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar PT X melakukan PHK terhadap X serta menganalisis kesesuaian upaya yang telah ditempuh X yang mengalami PHK secara sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Responden dan Narasumber dengan cara wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT X dikarenakan X telah turut serta melakukan penggelapan premi yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai alasan PHK merupakan hal yang tidak tepat mengingat pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. *Kedua*, upaya yang telah ditempuh X selaku pekerja yang di PHK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci: PHK, Perselisihan Hubungan Industrial, Hak Pekerja

* Mahasiswa Departemen Hukum Perdata program Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***JURIDICAL REVIEW TOWARD RIGHTS OF EMPLOYEE THAT HAVE
TERMINATION (CASE STUDY ON PT X)***

By: Bill Gates Mandheza Windson*

ABSTRACT

This legal research aims to provide an analysis of the basis PT X in conducting termination towards X and the compliance of the legal remedy since Tri Subketi has unilaterally suffered termination in accordance with the Act 2 of 2004 regarding Industrial Relations Dispute Settlement.

The nature of this research is descriptive, namely explaining the details of the legal research results. This research uses a normative-empirical legal research method. Type of the data which being used is primary and secondary. Primary data were obtained from respondents and interviewees by means of interviews while secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection used are interview guidelines. Data obtained from the results of the research then analyzed using a qualitative method.

Based on the analysis research results, there are acquired two conclusions. First, the basis of Industrial Relations Dissolution (PHK) conducted by X was caused in the sense that X was conducting embezzlement premium as categorize severe penalty to act conducting such fraud, theft, or embezzlement of the company money as mentioned in Article 158 (1) b of the Act 13 of 2003 concerning Manpower. Second, X who is employee suffered termination has conducted legal remedy as deemed in accordance with the Act 2 of 2004 regarding Industrial Relations Dispute Settlement.

Keywords: Termination, Industrial Relations Dissolution, Right of employee

* Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada